

## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS  
DAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA  
GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN DAN  
PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA  
SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TANGGAL : 2 JANUARI 2015**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS DAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C  
KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI  
UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negara Sipil Yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas Selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS DAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA.

Pasal 1

- (1) Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama meliputi:
  - a. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
  - b. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri;
  - c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun Janda/Dudanya;

- e. Pemberhentian karena meninggal dunia;
  - f. Pemberhentian karena tewas;
  - g. Pemberhentian karena cacat karena dinas serta pemberian pensiun Janda/Dudanya;
  - h. Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia; dan
  - i. Pensiun Janda/Duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.
- (2) Selain Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

#### Pasal 2

Penetapan angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 3

Angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 2 (dua) huruf kapital pertama menunjukkan jenis pemberhentian, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, dan 6 (enam) digit angka terakhir menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 4

Angka pengenal nomor Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun serta Kenaikan Pangkat Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 5 (lima) digit angka pertama menunjukkan nomor urut keputusan, KEPKA, huruf kapital selanjutnya menunjukkan jenis pemberhentian, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, dan 2 (dua) digit angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 5

Kode instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2015

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan/Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR  
 PERTIMBANGAN TEKNIS DAN KEPUTUSAN KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA  
 UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS  
 SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI  
 JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA  
 SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
 PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT  
 PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN  
 PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN  
 MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

NO	JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS	KODE
1	2	3
1	Pemberhentian atas permintaan sendiri.	PA- 00000000000
2	Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri.	PB- 00000000000
3	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.	PC- 00000000000
4	Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya.	PD- 00000000000
5	Pemberhentian karena meninggal dunia.	PE- 00000000000
6	Pemberhentian karena tewas.	PF- 00000000000
7	Pemberhentian karena cacat karena dinas serta pemberian pensiun janda/dudanya.	PG- 00000000000
8	Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.	PH- 00000000000
9	Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.	PI- 00000000000

10	Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/c.	PJ- 0000000000
----	---	----------------

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Perencanaan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto



LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR  
 PERTIMBANGAN TEKNIS DAN KEPUTUSAN KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA  
 MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN  
 PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN  
 PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT  
 FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

ANGKA PENGENAL NOMOR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
 NEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA  
 GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN DAN  
 PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI  
 JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT  
 FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

NO	JENIS KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KODE
1	2	3
1	Pemberhentian atas permintaan sendiri.	00000/KEPKA/AP/00000/00
2	Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri.	00000/KEPKA/TAP/00000/00
3	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.	00000/KEPKA/TDH/00000/00
4	Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya.	00000/KEPKA/AV/00000/00
5	Pemberhentian karena meninggal dunia.	00000/KEPKA/MD/00000/00
6	Pemberhentian karena tewas.	00000/KEPKA/AX/00000/00
7	Pemberhentian karena cacat karena dinas serta pemberian pensiun janda/dudanya.	00000/KEPKA/AW/00000/00
8	Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.	00000/KEPKA/AY/00000/00
9	Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.	00000/KEPKA/AZ/00000/00

10	Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e.	00000/KEPKA/KPP/00000/00
----	---	--------------------------

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peratapan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS DAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C  
 KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI  
 UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH

NO	NAMA INSTANSI	KODE
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)	11001
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	11002
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	11003
4	Kementerian Koordinator Bidang Maritim	11004
5	Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi	12001
6	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	12002
7	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	12003
8	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12004
9	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	12005
10	Kementerian Pemuda Olahraga	12006
11	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	12007
12	Kementerian Dalam Negeri	12008
13	Kementerian Luar Negeri	12009
14	Kementerian Pertahanan	12010
15	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	12011
16	Kementerian Keuangan	12012
17	Kementerian Pertanian	12013
18	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	12014
19	Kementerian Perhubungan	12015
20	Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah	12016
21	Kementerian Kesehatan	12017
22	Kementerian Agama	12018
23	Kementerian Tenaga Kerja	12019
24	Kementerian Sosial	12020
25	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12021
26	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	12022
27	Kementerian Komunikasi dan Informatika	12023
28	Kementerian Perdagangan	12024
29	Kementerian Perindustrian	12025
30	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	12026
31	Kementerian Pariwisata	12027
32	Kementerian Sekretariat Negara	12028
33	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	12029
34	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	12030
35	Mahkamah Agung Republik Indonesia	13001
36	Kejaksaan Agung	13002
37	Kepolisian Negara	13003
38	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	14001
39	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	14002
40	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	14003

41	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	14004
42	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	14005
43	Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi	14006
44	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	14007
45	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	14008
46	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	14009
47	Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha	14010
48	Sekretariat Kabinet	14011
49	Sekretariat Presiden	14012
50	Sekretariat Wakil Presiden	14013
51	Badan Kepegawaian Negara	15001
52	Badan Informasi Geospasial	15002
53	Badan Intelijen Negara	15003
54	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	15004
55	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	15005
56	Badan Koordinasi Penanaman Modal	15006
57	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	15007
58	Badan Narkotika Nasional	15008
59	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	15009
60	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	15010
61	Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	15011
62	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	15012
63	Badan Pemeriksa Keuangan	15013
64	Badan Pengawas Obat dan Makanan	15014
65	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	15015
66	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	15016
67	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	15017
68	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	15018
69	Badan Pusat Statistik	15019
70	Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas)	15020
71	Badan Standardisasi Nasional	15021
72	Badan Tenaga Nuklir Nasional	15022
73	Badan Pengawas Pemilihan Umum	15023
74	Lembaga Administrasi Negara	15024
75	Lembaga Sandi Negara	15025
76	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	15026
77	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	15027
78	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	15028
79	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	15029
80	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	15030
81	Ombudsman Republik Indonesia	15031
82	Arsip Nasional Republik Indonesia	15032
83	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	15033
84	Pemerintah Aceh	21100
85	Pemerintah Kabupaten Simeulue	21101
86	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	21102
87	Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	21103
88	Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	21104
89	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	21105
90	Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	21106
91	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	21107
92	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	21108
93	Pemerintah Kabupaten Pidie	21109
94	Pemerintah Kabupaten Bireuen	21110
95	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	21111
96	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	21112
97	Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	21113

98	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	21114
99	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	21115
100	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	21116
101	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	21117
102	Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	21118
103	Pemerintah Kota Banda Aceh	21171
104	Pemerintah Kota Sabang	21172
105	Pemerintah Kota Langsa	21173
106	Pemerintah Kota Lhokseumawe	21174
107	Pemerintah Kota Subulussalam	21175
108	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	21200
109	Pemerintah Kabupaten Nias	21201
110	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	21202
111	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	21203
112	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	21204
113	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	21205
114	Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	21206
115	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	21207
116	Pemerintah Kabupaten Asahan	21208
117	Pemerintah Kabupaten Simalungun	21209
118	Pemerintah Kabupaten Dairi	21210
119	Pemerintah Kabupaten Karo	21211
120	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	21212
121	Pemerintah Kabupaten Langkat	21213
122	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	21214
123	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	21215
124	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	21216
125	Pemerintah Kabupaten Samosir	21217
126	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	21218
127	Pemerintah Kabupaten Batubara	21219
128	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	21220
129	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	21221
130	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	21222
131	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	21223
132	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	21224
133	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	21225
134	Pemerintah Kota Sibolga	21271
135	Pemerintah Kota Tanjung Balai	21272
136	Pemerintah Kota Pematang Siantar	21273
137	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	21274
138	Pemerintah Kota Medan	21275
139	Pemerintah Kota Binjai	21276
140	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	21277
141	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	21278
142	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	21300
143	Pemerintah Kabupaten Kep. Mentawai	21301
144	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	21302
145	Pemerintah Kabupaten Solok	21303
146	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	21304
147	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	21305
148	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	21306
149	Pemerintah Kabupaten Agam	21307
150	Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota	21308
151	Pemerintah Kabupaten Pasaman	21309
152	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	21310
153	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	21311
154	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	21312

155	Pemerintah Kota Padang	21371
156	Pemerintah Kota Solok	21372
157	Pemerintah Kota Sawahlunto	21373
158	Pemerintah Kota Padang Panjang	21374
159	Pemerintah Kota Bukittinggi	21375
160	Pemerintah Kota Payakumbuh	21376
161	Pemerintah Kota Pariaman	21377
162	Pemerintah Provinsi Riau	21400
163	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	21401
164	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	21402
165	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	21403
166	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	21404
167	Pemerintah Kabupaten Siak	21405
168	Pemerintah Kabupaten Kampar	21406
169	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	21407
170	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	21408
171	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	21409
172	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	21410
173	Pemerintah Kota Pekanbaru	21471
174	Pemerintah Kota Dumai	21472
175	Pemerintah Provinsi Jambi	21500
176	Pemerintah Kabupaten Kerinci	21501
177	Pemerintah Kabupaten Merangin	21502
178	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	21503
179	Pemerintah Kabupaten Batang Hari	21504
180	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	21505
181	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	21506
182	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	21507
183	Pemerintah Kabupaten Tebo	21508
184	Pemerintah Kabupaten Bungo	21509
185	Pemerintah Kota Jambi	21571
186	Pemerintah Kota Sungai Penuh	21572
187	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	21600
188	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	21601
189	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	21602
190	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	21603
191	Pemerintah Kabupaten Lahat	21604
192	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	21605
193	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	21606
194	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	21607
195	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sel.	21608
196	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	21609
197	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	21610
198	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	21612
199	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	21613
200	Pemerintah Kota Palembang	21671
201	Pemerintah Kota Prabumulih	21672
202	Pemerintah Kota Pagar Alam	21673
203	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	21674
204	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	21675
205	Pemerintah Provinsi Bengkulu	21700
206	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	21701
207	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	21702
208	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara	21703
209	Pemerintah Kabupaten Kaur	21704
210	Pemerintah Kabupaten Seluma	21705
211	Pemerintah Kabupaten Mukomuko	21706

212	Pemerintah Kabupaten Lebong	21707
213	Pemerintah Kabupaten Kepahiang	21708
214	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	21709
215	Pemerintah Kota Bengkulu	21771
216	Pemerintah Provinsi Lampung	21800
217	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	21801
218	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	21802
219	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	21803
220	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	21804
221	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	21805
222	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	21806
223	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	21807
224	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	21808
225	Pemerintah Kabupaten Pesawaran	21809
226	Pemerintah Kabupaten Mesuji	21810
227	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	21811
228	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	21812
229	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	21813
230	Pemerintah Kota Bandar Lampung	21871
231	Pemerintah Kota Metro	21872
232	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	21900
233	Pemerintah Kabupaten Bangka	21901
234	Pemerintah Kabupaten Belitung	21902
235	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	21903
236	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	21904
237	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	21905
238	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	21906
239	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	21971
240	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	22100
241	Pemerintah Kabupaten Karimun	22101
242	Pemerintah Kabupaten Bintan	22102
243	Pemerintah Kabupaten Natuna	22103
244	Pemerintah Kabupaten Lingga	22104
245	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	22105
246	Pemerintah Kota Batam	22171
247	Pemerintah Kota Tanjungpinang	22172
248	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	23100
249	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	23200
250	Pemerintah Kabupaten Bogor	23201
251	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	23202
252	Pemerintah Kabupaten Cianjur	23203
253	Pemerintah Kabupaten Bandung	23204
254	Pemerintah Kabupaten Garut	23205
255	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	23206
256	Pemerintah Kabupaten Ciamis	23207
257	Pemerintah Kabupaten Kuningan	23208
258	Pemerintah Kabupaten Cirebon	23209
259	Pemerintah Kabupaten Majalengka	23210
260	Pemerintah Kabupaten Sumedang	23211
261	Pemerintah Kabupaten Indramayu	23212
262	Pemerintah Kabupaten Subang	23213
263	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	23214
264	Pemerintah Kabupaten Karawang	23215
265	Pemerintah Kabupaten Bekasi	23216
266	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	23217
267	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	23218
268	Pemerintah Kota Bogor	23271

269	Pemerintah Kota Sukabumi	23272
270	Pemerintah Kota Bandung	23273
271	Pemerintah Kota Cirebon	23274
272	Pemerintah Kota Bekasi	23275
273	Pemerintah Kota Depok	23276
274	Pemerintah Kota Cimahi	23277
275	Pemerintah Kota Tasikmalaya	23278
276	Pemerintah Kota Banjar	23279
277	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	23300
278	Pemerintah Kabupaten Cilacap	23301
279	Pemerintah Kabupaten Banyumas	23302
280	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	23303
281	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	23304
282	Pemerintah Kabupaten Kebumen	23305
283	Pemerintah Kabupaten Purworejo	23306
284	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	23307
285	Pemerintah Kabupaten Magelang	23308
286	Pemerintah Kabupaten Boyolali	23309
287	Pemerintah Kabupaten Klaten	23310
288	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	23311
289	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	23312
290	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	23313
291	Pemerintah Kabupaten Sragen	23314
292	Pemerintah Kabupaten Grobogan	23315
293	Pemerintah Kabupaten Blora	23316
294	Pemerintah Kabupaten Rembang	23317
295	Pemerintah Kabupaten Pati	23318
296	Pemerintah Kabupaten Kudus	23319
297	Pemerintah Kabupaten Jepara	23320
298	Pemerintah Kabupaten Demak	23321
299	Pemerintah Kabupaten Semarang	23322
300	Pemerintah Kabupaten Temanggung	23323
301	Pemerintah Kabupaten Kendal	23324
302	Pemerintah Kabupaten Batang	23325
303	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	23326
304	Pemerintah Kabupaten Pemalang	23327
305	Pemerintah Kabupaten Tegal	23328
306	Pemerintah Kabupaten Brebes	23329
307	Pemerintah Kota Magelang	23371
308	Pemerintah Kota Surakarta	23372
309	Pemerintah Kota Salatiga	23373
310	Pemerintah Kota Semarang	23374
311	Pemerintah Kota Pekalongan	23375
312	Pemerintah Kota Tegal	23376
313	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	23400
314	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	23401
315	Pemerintah Kabupaten Bantul	23402
316	Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	23403
317	Pemerintah Kabupaten Sleman	23404
318	Pemerintah Kota Yogyakarta	23471
319	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	23500
320	Pemerintah Kabupaten Pacitan	23501
321	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	23502
322	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	23503
323	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	23504
324	Pemerintah Kabupaten Blitar	23505
325	Pemerintah Kabupaten Kediri	23506



326	Pemerintah Kabupaten Malang	23507
327	Pemerintah Kabupaten Lumajang	23508
328	Pemerintah Kabupaten Jember	23509
329	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	23510
330	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	23511
331	Pemerintah Kabupaten Situbondo	23512
332	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	23513
333	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	23514
334	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	23515
335	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	23516
336	Pemerintah Kabupaten Jombang	23517
337	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	23518
338	Pemerintah Kabupaten Madiun	23519
339	Pemerintah Kabupaten Magetan	23520
340	Pemerintah Kabupaten Ngawi	23521
341	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	23522
342	Pemerintah Kabupaten Tuban	23523
343	Pemerintah Kabupaten Lamongan	23524
344	Pemerintah Kabupaten Gresik	23525
345	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	23526
346	Pemerintah Kabupaten Sampang	23527
347	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	23528
348	Pemerintah Kabupaten Sumenep	23529
349	Pemerintah Kota Kediri	23571
350	Pemerintah Kota Blitar	23572
351	Pemerintah Kota Malang	23573
352	Pemerintah Kota Probolinggo	23574
353	Pemerintah Kota Pasuruan	23575
354	Pemerintah Kota Mojokerto	23576
355	Pemerintah Kota Madiun	23577
356	Pemerintah Kota Surabaya	23578
357	Pemerintah Kota Batu	23579
358	Pemerintah Provinsi Banten	23600
359	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	23601
360	Pemerintah Kabupaten Lebak	23602
361	Pemerintah Kabupaten Tangerang	23603
362	Pemerintah Kabupaten Serang	23604
363	Pemerintah Kota Tangerang	23671
364	Pemerintah Kota Cilegon	23672
365	Pemerintah Kota Serang	23673
366	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	23674
367	Pemerintah Provinsi Bali	25100
368	Pemerintah Kabupaten Jembrana	25101
369	Pemerintah Kabupaten Tabanan	25102
370	Pemerintah Kabupaten Badung	25103
371	Pemerintah Kabupaten Gianyar	25104
372	Pemerintah Kabupaten Klungkung	25105
373	Pemerintah Kabupaten Bangli	25106
374	Pemerintah Kabupaten Karangasem	25107
375	Pemerintah Kabupaten Buleleng	25108
376	Pemerintah Kota Denpasar	25171
377	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	25200
378	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	25201
379	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	25202
380	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	25203
381	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	25204
382	Pemerintah Kabupaten Dompu	25205

383	Pemerintah Kabupaten Bima	25206
384	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	25207
385	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	25208
386	Pemerintah Kota Mataram	25271
387	Pemerintah Kota Bima	25272
388	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	25300
389	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	25301
390	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	25302
391	Pemerintah Kabupaten Kupang	25303
392	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	25304
393	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	25305
394	Pemerintah Kabupaten Belu	25306
395	Pemerintah Kabupaten Alor	25307
396	Pemerintah Kabupaten Lembata	25308
397	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	25309
398	Pemerintah Kabupaten Sikka	25310
399	Pemerintah Kabupaten Ende	25311
400	Pemerintah Kabupaten Ngada	25312
401	Pemerintah Kabupaten Manggarai	25313
402	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	25314
403	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	25315
404	Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	25316
405	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	25317
406	Pemerintah Kabupaten Nagekeo	25318
407	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	25319
408	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	25320
409	Pemerintah Kabupaten Malaka	25321
410	Pemerintah Kota Kupang	25371
411	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	26100
412	Pemerintah Kabupaten Sambas	26101
413	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	26102
414	Pemerintah Kabupaten Landak	26103
415	Pemerintah Kabupaten Pontianak	26104
416	Pemerintah Kabupaten Sanggau	26105
417	Pemerintah Kabupaten Ketapang	26106
418	Pemerintah Kabupaten Sintang	26107
419	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	26108
420	Pemerintah Kabupaten Sekadau	26109
421	Pemerintah Kabupaten Melawi	26110
422	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	26111
423	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	26112
424	Pemerintah Kota Pontianak	26171
425	Pemerintah Kota Singkawang	26172
426	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	26200
427	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	26201
428	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	26202
429	Pemerintah Kabupaten Kapuas	26203
430	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	26204
431	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	26205
432	Pemerintah Kabupaten Sukamara	26206
433	Pemerintah Kabupaten Lamandau	26207
434	Pemerintah Kabupaten Seruyan	26208
435	Pemerintah Kabupaten Katingan	26209
436	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	26210
437	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	26211
438	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	26212
439	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	26213

440	Pemerintah Kota Palangka Raya	26271
441	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	26300
442	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	26301
443	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	26302
444	Pemerintah Kabupaten Banjar	26303
445	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	26304
446	Pemerintah Kabupaten Tapin	26305
447	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	26306
448	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	26307
449	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	26308
450	Pemerintah Kabupaten Tabalong	26309
451	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	26310
452	Pemerintah Kabupaten Balangan	26311
453	Pemerintah Kota Banjarmasin	26371
454	Pemerintah Kota Banjarbaru	26372
455	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	26400
456	Pemerintah Kabupaten Paser	26401
457	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	26402
458	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	26403
459	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	26404
460	Pemerintah Kabupaten Berau	26405
461	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	26409
462	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	26411
463	Pemerintah Kota Balikpapan	26471
464	Pemerintah Kota Samarinda	26472
465	Pemerintah Kota Bontang	26474
466	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	26500
467	Pemerintah Kabupaten Bulungan	26501
468	Pemerintah Kabupaten Malinau	26502
469	Pemerintah Kabupaten Nunukan	26503
470	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	26504
471	Pemerintah Kota Tarakan	26571
472	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	27100
473	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	27101
474	Pemerintah Kabupaten Minahasa	27102
475	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	27103
476	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	27104
477	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	27105
478	Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	27106
479	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	27107
480	Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	27108
481	Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	27109
482	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	27110
483	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	27111
484	Pemerintah Kota Manado	27171
485	Pemerintah Kota Bitung	27172
486	Pemerintah Kota Tomohon	27173
487	Pemerintah Kota KotaMobaigu	27174
488	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	27200
489	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	27201
490	Pemerintah Kabupaten Banggai	27202
491	Pemerintah Kabupaten Morowali	27203
492	Pemerintah Kabupaten Poso	27204
493	Pemerintah Kabupaten Donggala	27205
494	Pemerintah Kabupaten Tolitoli	27206
495	Pemerintah Kabupaten Buol	27207
496	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	27208

497	Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una	27209
498	Pemerintah Kabupaten Sigi	27210
499	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	27211
500	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	27212
501	Pemerintah Kota Palu	27271
502	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	27300
503	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	27301
504	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	27302
505	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	27303
506	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	27304
507	Pemerintah Kabupaten Takalar	27305
508	Pemerintah Kabupaten Gowa	27306
509	Pemerintah Kabupaten Sinjai	27307
510	Pemerintah Kabupaten Maros	27308
511	Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	27309
512	Pemerintah Kabupaten Barru	27310
513	Pemerintah Kabupaten Bone	27311
514	Pemerintah Kabupaten Soppeng	27312
515	Pemerintah Kabupaten Wajo	27313
516	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	27314
517	Pemerintah Kabupaten Pinrang	27315
518	Pemerintah Kabupaten Enrekang	27316
519	Pemerintah Kabupaten Luwu	27317
520	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	27318
521	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	27319
522	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	27320
523	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	27321
524	Pemerintah Kota Makassar	27371
525	Pemerintah Kota Parepare	27372
526	Pemerintah Kota Palopo	27373
527	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	27400
528	Pemerintah Kabupaten Buton	27401
529	Pemerintah Kabupaten Muna	27402
530	Pemerintah Kabupaten Konawe	27403
531	Pemerintah Kabupaten Kolaka	27404
532	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	27405
533	Pemerintah Kabupaten Bombana	27406
534	Pemerintah Kabupaten Wakatobi	27407
535	Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	27408
536	Pemerintah Kabupaten Buton Utara	27409
537	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara	27410
538	Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur	27411
539	Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	27412
540	Pemerintah Kota Kendari	27471
541	Pemerintah Kota Baubau	27472
542	Pemerintah Provinsi Gorontalo	27500
543	Pemerintah Kabupaten Boalemo	27501
544	Pemerintah Kabupaten Gorontalo	27502
545	Pemerintah Kabupaten Pohuwato	27503
546	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	27504
547	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	27505
548	Pemerintah Kota Gorontalo	27571
549	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	27600
550	Pemerintah Kabupaten Majene	27601
551	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	27602
552	Pemerintah Kabupaten Mamasa	27603
553	Pemerintah Kabupaten Mamuju	27604

554	Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara	27605
555	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	27606
556	Pemerintah Provinsi Maluku	28100
557	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat	28101
558	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	28102
559	Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	28103
560	Pemerintah Kabupaten Buru	28104
561	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	28105
562	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat	28106
563	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur	28107
564	Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	28108
565	Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya	28109
566	Pemerintah Kota Ambon	28171
567	Pemerintah Kota Tual	28172
568	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	28200
569	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	28201
570	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	28202
571	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula	28203
572	Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	28204
573	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	28205
574	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	28206
575	Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	28207
576	Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu	28208
577	Pemerintah Kota Ternate	28271
578	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	28272
579	Pemerintah Provinsi Papua Barat	29100
580	Pemerintah Kabupaten Fak-Fak	29101
581	Pemerintah Kabupaten Kaimana	29102
582	Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama	29103
583	Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	29104
584	Pemerintah Kabupaten Manokwari	29105
585	Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	29106
586	Pemerintah Kabupaten Sorong	29107
587	Pemerintah Kabupaten Raja Ampat	29108
588	Pemerintah Kabupaten Maybrat	29109
589	Pemerintah Kabupaten Tambrauw	29110
590	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak	29111
591	Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan	29112
592	Pemerintah Kota Sorong	29171
593	Pemerintah Provinsi Papua	29400
594	Pemerintah Kabupaten Merauke	29401
595	Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	29402
596	Pemerintah Kabupaten Jayapura	29403
597	Pemerintah Kabupaten Nabire	29404
598	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen	29405
599	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	29406
600	Pemerintah Kabupaten Paniai	29407
601	Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya	29408
602	Pemerintah Kabupaten Mimika	29409
603	Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	29410
604	Pemerintah Kabupaten Mappi	29411
605	Pemerintah Kabupaten Asmat	29412
606	Pemerintah Kabupaten Yahukimo	29413
607	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang	29414
608	Pemerintah Kabupaten Tolikara	29415
609	Pemerintah Kabupaten Sarmi	29416
610	Pemerintah Kabupaten Keerom	29417

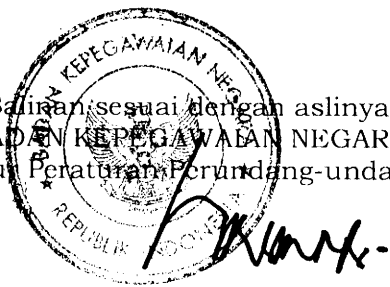
611	Pemerintah Kabupaten Waropen	29418
612	Pemerintah Kabupaten Supiori	29419
613	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya	29420
614	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah	29421
615	Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya	29422
616	Pemerintah Kabupaten Yalimo	29423
617	Pemerintah Kabupaten Nduga	29424
618	Pemerintah Kabupaten Dogiyai	29425
619	Pemerintah Kabupaten Deiyai	29426
620	Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	29427
621	Pemerintah Kabupaten Puncak	29428
622	Pemerintah Kota Jayapura	29471

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto